

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MENTULIK KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020

Oleh: Gita Afwah Yonda

Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S.IP., MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax.0761-63277

ABSTRAK

Desa Mentulik adalah wilayah di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan induk yakni Kabupaten Kampar. Desa ini diambil sebagai objek penelitian dengan pertimbangan sebagai desa yang belum mandiri di antara desa lainnya di Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Penelitian ini dilakukan agar dapat mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Mentulik serta faktor – faktor yang mendukung dan menghambat proses Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards mengenai empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Adapun data yang digunakan pada penelitian bersifat kualitatif.

Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2020 belum berjalan dengan baik. Pada komunikasi terdapat kurang jelasnya informasi yang disampaikan atasan kepada struktur yang dibawahnya, kurang tepatnya informasi yang disampaikan, kemudian juga kurang konsisten informasi yang disampaikan , waktu yang suka berubah ubah secara tiba-tiba. Kemudian sumber daya, sumber daya manusianya kurang paham akan teknologi, Masyarakat kurang berpartisipasi, namun sarana dan prasaran cukup memadai. Disposisi, pembagian tugas dan tupoksi para pelaksana atau aparat sudah sesuai dengan keterampilan dan keinginan masing-masing aparat, namun program yang dijalankan tidak semuanya terlaksana, kemudian pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) penggunaan dana desa dari pemerintah pusat ke Desa Mentulik yang tidak tepat waktu. Struktur birokrasi, seluruh aparat sudah mela ksanakan tugas sesuai dengan SOP yang dilaksanakan namun kurang maksimal karna faktor penghambat yang ada.

Kata Kunci: Implementasi – Kebijakan Dana Desa – Desa Mentulik

ABSTRACT

Mentulik Village is an area in Kampar Kiri Hilir Sub-district, Kampar Regency, Riau Province, which is an expansion sub-district from the parent sub-district, namely Kampar Regency. This village was taken as the object of research with the consideration of being a village that has not been independent among other villages in the Kampar Kiri Hilir District. So this research intends to describe, analyze the implementation of the Village Fund policy in Mentulik Village and analyze the factors that support and hinder the process of implementing the village fund policy in Mentulik Village, Kampar Kiri Hilir District. This research uses George C. Edwards' theory of the four factors that influence policy implementation, namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The data used in the research is qualitative.

The results of research on the Implementation of Village Fund Policy in Mentulik Village, Kampar Kiri Hilir District, Kampar Regency in 2020 have not gone well. In communication there is a lack of clarity in the information conveyed by superiors to the structures below them, less precise information is conveyed, then there is also a lack of consistency in the information conveyed, times tend to change suddenly. Then the resources, human resources do not understand technology, the community lacks participation, but the facilities and infrastructure are adequate. The disposition, division of tasks and main tasks and functions of the implementers or officials are in accordance with the skills and wishes of each apparatus, but not all of the programs implemented are implemented. Then the provision of technical implementation guidelines (legal basis) for the use of village funds from the central government to Mentulik Village is incorrect. time. In the bureaucratic structure, all officers have carried out their duties in accordance with the implemented SOPs, but this has not been optimal due to existing inhibiting factors.

Keywords: Implementation – Village Fund Policy - Mentulik Village

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan peraturan dari Kementrian Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, terdapat 74.957 Desa di Indonesia. Pembangunan pedesaan baik skala nasional maupun daerah berperan penting dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasil lainnya serta menyatu secara langsung bagi kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan (Peraturan Kementerian, 2017). Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh sebab itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah desa dan untuk kesejahteraan bagi wilayah desa, maka pemerintah pada Tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang – undangan baru yaitu Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa, tetapi disusun bersama Badan Permusyawaratan Desa

dan melihat beberapa unsur masyarakat desa. RKP Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah RKP Desa Mentulik Nomor 05 Tahun 2017 tentang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Mentulik.

Dana Desa sebagai salah satu pendapatan utama desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Seluruh penggunaan dana dialokasikan untuk pemberdayaan desa. Dengan luas wilayah ±12.000 ha dan panjang sungai ±12 km, penggunaan Dana Desa di Desa Mentulik terserap habis untuk pemberdayaan desa. Dana Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan otonomi desa. Hal ini dapat dinilai salah satunya dengan mengkaji tingkat keberhasilan penggunaan Dana Desa yang ada. Sebagai contoh, pembangunan jalan, pembangunan lampu jalan, sekolah dan puskesmas. Akan tetapi setelah dana di arahkan untuk perbaikan sarana publik, terjadi permasalahan negara mengenai penanggulangan pembangunan itu tidak

mudah dan tidak berjalan dengan apa yang telah direncanakan. Adapun persentase berjalannya program di Desa Mentulik hanya 60%, sedangkan 40% nya lagi tersendat akibat kurangnya dana dan perhatian pemerintah desa yang sangat minim dan dikarenakan

anggaran dana yang mana lebih diprioritaskan untuk pemberdayaan, pembinaan dan penanggulangan bencana. Adapun Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukkan anggaran rencana biaya dan realisasi anggaran yang digunakan pada Desa Mentulik.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp830.621.000	Rp989.320.000	Rp1.397.876.200
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp1.258.199.000	Rp687.478.100	Rp689.238.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp1.180.760.000	Rp188.610.000	Rp536.851.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp181.456.000	Rp893.294.000	Rp348.211.000
5	Penyertaan Modal BUMDES	Rp. -	Rp. -	Rp100.000.000
Jumlah Belanja		Rp3.451.036.000	Rp3.553.776.000	Rp3.072.176.200

Sumber: RPJMDes & RKPDes Desa Mentulik tahun 2019 – 2021

Tabel 1.2 Realisasi dan Rencana Anggaran Belanja Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2023

No	Bidang	Rencana Biaya	Realisasi Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 467.920.000,00	Rp 397.478.000,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.159.800.000,00	Rp 989.199.100,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 53.300.000,00	Rp 32.294.000,00
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 204.000.000,00	Rp 197.785.000,00
5	Penyertaan Modal BUMDes	Rp 156.800.000,00	Rp 146.615.200,00
Total		Rp 2.041.820.000,00	Rp 1.763.371.300,00

Sumber: RKPDes Desa Mentulik tahun 2023

Dana Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan otonomi desa. Hal ini dapat dinilai salah satunya dengan mengkaji tingkat keberhasilan penggunaan Dana Desa yang ada. Sebagai contoh, pembangunan jalan, pembangunan lampu jalan, sekolah, dan puskesmas. Akan tetapi setelah dana di arahkan untuk perbaikan sarana publik, terjadi permasalahan negara mengenai penanggulangan pembangunan itu tidak mudah dan tidak berjalan dengan apa yang telah direncanakan. Adapun persentase berjalannya program di Desa Mentulik hanya 60%, sedangkan 40% nya lagi tersendat akibat kurangnya dana dan perhatian pemerintah desa yang sangat minim dan dikarenakan anggaran dana yang mana lebih diprioritaskan untuk pemberdayaan, pembinaan, dan penanggulangan bencana. Dari hal ini maka fenomena masalah dari penelitian ini adalah:

1. Ketidaksesuaian realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan desa dengan perencanaan belanja pelaksanaan pembangunan desa
2. Masih terdapat pembangunan yang belum terealisasi, padahal sudah dimasukkan dalam daftar belanja pelaksanaan pembangunan desa

Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pahamnya masyarakat akan adanya program Dana Desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan Dana Desa dari pemerintahan desa kemudian pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh pengelola keuangan desa. Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

“Bagaimana Impelementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Tahun 2020?”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir tahun 2020.

D. Kerangka Teori

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2012: 674). Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul

Kebijakan Publik (2012: 227) juga menyatakan bahwa implementasi kebijakan memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap

implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian hasil akhir (*output*), yaitu apakah hasil yang

diinginkan telah tercapai atau belum. Terkait dengan hal tersebut, maka keberhasilan sebuah proses implementasi kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam mengimplementasikan kebijakan, tentu ada beberapa faktor pendukung atau

bahkan menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan publik tersebut, pada penelitian ini penulis merujuk pada pemikiran George C. Edwards. Teori kebijakan yang dicetuskan oleh George C. Edwards III dianggap relevan untuk melakukan penelitian ini, karena teori ini dapat digunakan sebagai alat analisis untuk melihat bagaimana pelaksanaan program Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Hilir. Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan (George III Edward: *Implemeting Public Policy*, 1980), yaitu:

1. Komunikasi

Dalam proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting menurut Edwards, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Berikut adalah penjelasannya, yaitu:

- 1) Transmisi, yang dimaksud disini adalah informasi yang tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait.
- 2) Konsistensi, yang dimaksud disini adalah informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga para pelaksana kebijakan dapat menjalankan

tugasnya dengan baik.

- 3) Kejelasan, yang dimaksud disini adalah informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia yang memadai, wewenang, dan fasilitas. Berikut adalah penjelasannya, yaitu:

1) Sumber Daya Manusia yang Memadai

Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, keahlian dan profesional dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, tentu akan menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

2) Informasi

Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi bagaimana

melaksanakan suatu kebijakan. Kedua, para pelaksana kebijakan harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati peraturan-peraturan pemerintah.

3) Wewenang

Wewenang berperan penting dalam implementasi kebijakan, terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan. Wewenang mempunyai banyak bentuk yang berbeda, sepertimengeluarkan perintah kepada para pejabat yang lain, wewenang dalam menyediakan dan menyalurkan dana, sebagainya.

4) Fasilitas

Fasilitas ini menyangkut sarana dan prasarana dalam menunjang dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, tentu mereka akan melaksanakan kebijakan yang diinginkan para pembuat keputusan awal. Namun, sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka implementasi kebijakan akan sulit. Jadi kebijakan yang dilaksanakan akan berjalan secara efektif apabila mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi implementor kebijakan. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut:

1) *Standar Operating Procedure* (SOP)

Merupakan prosedur kerja ukuran dasar atau pedoman bagi para implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, agar sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

2) Fragmentasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terjadi desentralisasi kekuasaan, tentu akan terjadi lemahnya pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit. Hal ini dapat terjadi karena adanya tekanan-tekanan di luar unit birokrasi, seperti kelompok kepentingan, pejabat eksekutif dan sebagainya.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi penelitian dari informan penelitian. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar.

G. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana informan-informan yang merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.5

Tabel 1.5 Informan Penelitian

JABATAN	NAMA
Camat	Albukhari M.Pd
Kepala Desa Mentulik	Zakir, SH
Sekretaris Desa Mentulik	JeFrizal
Ketua BPD	Aprinaldi, SE
Kaur Pembangunan	Kamaruzzaman
Kaur Keuangan	Uswatun Hasana
Kaur Pemerintah	Sri Ida Herlina, SPd
Pendamping Desa	Andi Arfam

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024

H. Jenis Data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan juga di catat untuk pertama kalinya. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Di dalam data primer ini berasal dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari arsip dan catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah arsip – arsip yang berasal dari Kantor Desa.

I. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan dokumentasi, sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Wawancara Secara Mendalam (*Indepth Interview*), wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Maksud mengadakan wawancara, antara lain adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; mengkonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (triangulasi), Guba dan Lincoln (Moleong, 2007:186).
2. Dokumentasi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, maka peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi yang dilakukan dengan mencatat atau menyalin dokumen-dokumen dan arsip-arsip, antara lain: Profil Kecamatan Kampar Kiri Hilir perencanaan pembangunan

desa, penganggaran pembangunan desa, dan aturan mengenai pelaksanaan Dana Desa serta dokumen lainnya yang terkait. Dokumen tersebut dipergunakan untuk melengkapi dan membuktikan segala aktifitas yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan Dana Desa.

J. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Model Interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014). Penyajian data merupakan susunan sekumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan serta membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Prosedur ini senada dengan prosedur yang direkomendasikan oleh Meleong bahwa proses analisis data dimulai dengan:

- Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, dalam hal ini adalah dari analisis dokumen dan hasil wawancara.
- Setelah ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan apa yang dinamakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan- pernyataan kunci yang perlu dijaga agar tetap berada didalamnya.
- Langkah selanjutnya adalah menyusunnya kedalam satuan-satuan untuk kemudian dikategorisasikan, dan melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik tertentu dan diakhiri dengan penafsiran data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan

Dana Desa di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Implementasi Kebijakan Dana Desa, ketika dievaluasi melalui empat indikator kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, membentuk kerangka penting untuk menilai efisiensi dan keberhasilan program ini. Dengan bantuan Dana Desa, Desa Mentulik memiliki kemampuan untuk melaksanakan inisiatif pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur yang akan mendorong dan perkembangan desa secara berkelanjutan. Warga Desa Mentulik dapat mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan bantuan Dana Desa. Adapun perkembangan dan infrastruktur Desa Mentulik yang sudah terlihat dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 menunjukkan perbandingan antara Desa Mentulik dengan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hilir, yaitu Desa Sungai Petai. Hal ini dilakukan peneliti, untuk dapat mengkaji bagaimana Implementasi Dana Desa yang digunakan di Desa Mentulik.

Tabel 3.1 Perkembangan dan Infrastruktur Desa Mentulik dan Desa Sungai Petai

	Desa Mentulik	Desa Sungai Petai
Kategori	Desa Maju	Desa Mandiri
Perkembangan	Tergolong lambat karena berada di pedalaman dan masyarakat setempat mayoritas masyarakat tempatan	Sudah lebih maju dan domisili asli masyarakatnya lebih meluas
Infrastruktur	Bangunan Kantor Desa, Aula Kantor Desa, Posyandu Permanen, Lapangan Bola Permanen	Kantor Desa, Pengembangan Ekowisata, Aula Terbuka, Saung-Saung Permanen, Posyandu Tidak Permanen, Tribun Stadion Mini

Sumber: Wawancara bersama Bapak Camat Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Selanjutnya, pelaksanaan implementasi Dana Desa ini bisa kita nilai berhasil atau tidaknya. Adapun indikator pendukungnya ialah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, dalam konteks komunikasi kebijakan, aspek penting yang mendasari efektivitas penyampaian informasi, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan
 - a. Transmisi
Komunikasi di Desa Mentulik dikatakan masih mengalami beberapa masalah, seperti penyampaian informasi yang belum tepat, terkait Dana Desa, sosialisasi yang dilakukan tidak seluruhnya yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Mentulik. Ini berlaku untuk hal-hal mengenai prioritas belanja desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dari Dana Desa.
 - b. Kejelasan
Hasil wawancara menggambarkan bahwa dalam musyawarah pembangunan desa, semua unsur pimpinan fungsional desa turut terlibat. Ini mencakup kehadiran pemerintahan desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan

Lembaga Adat Desa (LAD) yang berpartisipasi melalui forum Masyarakat Desa. Keberadaan semua unsur pimpinan fungsional ini mencerminkan pendekatan yang inklusif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Namun hal ini berbeda dengan yang di sampaikan Ketua BPD, hal ini menjelaskan bahwa adanya penyampaian yang kurang jelas di sampaikan oleh pemerintahan desa terhadap Masyarakat atau lembaga fungsional yang ada.

c. Konsistensi

Dalam hasil wawancara dengan pendamping desa, terungkap bahwa jadwal musyawarah Dana Desa di Desa Mentulik telah sering berubah secara mendadak. Perubahan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kesulitan bagi para peserta yang sudah mempersiapkan diri sesuai dengan jadwal awal. Kejadian perubahan jadwal yang tiba-tiba dapat menjadi hambatan dalam menciptakan keteraturan dan konsistensi, yang penting untuk memastikan partisipasi yang maksimal dan efektif dari berbagai pihak terkait.

- 2) Sumber Daya, memainkan peran sentral dalam kelancaran implementasi kebijakan Dana Desa. Dalam konteks Dana Desa, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada SDM, sarana dan prasarana. Dalam wawancara bersama Bapak Zakir, beliau mengakui bahwa tidak semua aparat desa memiliki pemahaman teknologi, terutama karena latar belakang pendidikan yang beragam, dari lulusan SMA hingga perguruan tinggi. Bapak Zakir menyadari bahwa kurangnya pemahaman teknologi dapat menjadi kendala dalam menjalankan tugas-tugas administratif di tingkat desa. Selain itu, aksesibilitas dan mobilitas yang memadai juga dibutuhkan oleh Desa Mentulik untuk mendukung implementasi kebijakan dengan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- 3) Disposisi, dari wawancara terlihat bahwa aparat desa secara aktif mendukung kebijakan yang dianggap bermanfaat untuk masyarakat. Wawancara tersebut mencerminkan adanya pemahaman kolektif dan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan desa. Keberhasilan kinerja aparat desa juga dapat diatribusikan pada komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik di antara mereka, meskipun demikian, seperti yang terungkap dalam wawancara tersebut, ada beberapa aparat desa yang bersikap kontra terhadap keputusan kebijakan tertentu.
- 4) Struktur Birokrasi, sebagai badan yang menjadi pelaksana kebijakan, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan dan

mengimplementasikan kebijakan yang telah dirancang. Dalam wawancara bersama informan, terlihat bahwa organisasi yang dimaksud telah melakukan penugasan dan pembagian tugas secara cermat sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing aparat. Pernyataan tersebut mencerminkan keselarasan antara tanggung jawab yang diberikan kepada setiap individu dengan tugas dan tupoksinya, yang seharusnya sesuai dengan peran dan fungsinya dalam struktur organisasi atau birokrasi. Namun, perlu diingat bahwa pemeliharaan dan evaluasi terus-menerus terhadap struktur birokrasi penting untuk mengatasi perubahan kebutuhan atau kondisi yang mungkin timbul seiring waktu.

2. Temuan di Lapangan Mengenai Sarana dan Prasarana Pembangunan Desa Mentulik

Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk pemerintahan desa. Alokasi Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di desa. Penggunaan alokasi Dana Desa di pergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Alokasi Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Namun, yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mentulik adalah tidak diupayakannya pemenuhan sarana prasarana desa melalui sumber

pendanaan dari Alokasi Dana Desa.

- 1) Perpustakaan di Desa ini seperti bangunan terbengkalai walaupun letak perpustakaan berada di lingkungan aula kantor desa. Ini membuktikan bahwa perpustakaan ini belum dibutuhkan atau tidak sesuai dengan minat masyarakat Desa Mentulik. Jika peneliti mempertimbangkan terkait Alokasi Dana Desa, pembangunan perpustakaan ini seharusnya tidak dilaksanakan saja dan dana yang tersedia dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Desa Mentulik.
- 2) Peneliti juga menemukan terdapat rumah yang masih layak dan bagus untuk dioperasikan di lingkungan posyandu setempat, namun terlihat bahwa rumah tersebut tidak pernah ditinggali atau dioperasikan sebagai kepentingan untuk posyandu setempat. Menurut peneliti, pembangunan seperti ini seharusnya telah memproporsikan dana yang diberikan untuk aspek sarana dan prasarana desa.
- 3) Temuan terakhir yang peneliti dapatkan di Desa Mentulik adalah tidak terdapatnya bohlam pada tiang lampu jalanan di Desa Mentulik. Hal ini sangat krusial sekali, dikarenakan Desa Mentulik terletak di pedalaman, dimana aksesibilitas dan jalan menuju desa inipun harus melewati jalanan yang dikelilingi dengan pohon-pohon tinggi yang membuat desa seharusnya mempertimbangkan aspek keamanan, salah satunya penerangan jalan. Namun, fakta yang terlihat di lapangan adalah

tidak adanya bohlam pada tiang lampu jalan. Ini membuktikan bahwa fasilitas yang justru seharusnya menjadi prioritas masyarakat setempat tidak diperhatikan dengan sangat baik. Alokasi Dana Desa seharusnya diujukan untuk hal-hal yang dapat memberikan manfaat secara langsung saat di bangunnya sarana prasarana tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa yang ada di Desa Mentulik belum berhasil dikarenakan kurangnya bobot dan value dari setiap indikator yang ada. Kurangnya informasi, pengetahuan, dan SDM juga berpengaruh besar pada hasil akhir dari kebijakan ini. Adapun penjelasan mengenai setiap indikator sebagai berikut:

1. Pada komunikasi terdapat kurang jelasnya informasi yang disampaikan atasan kepada struktur yang dibawahnya, kurang tepatnya informasi yang disampaikan, kemudian juga kurang konsisten informasi yang disampaikan, waktu yang suka berubah-ubah secara tiba-tiba. Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang

digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

2. Kemudian sumber daya, sumber daya manusianya kurang paham akan teknologi, masalah pendidikan juga mempengaruhi karena setelah turun ke lapangan, aksesibilitas dan mobilitas yang diperlukan untuk mendapatkan tempat pendidikan yang lebih baik cukup sulit, hal ini tentu berdampak pada SDM masyarakat setempat. Masyarakat juga kurang berpartisipasi, namun sarana dan prasarana cukup memadai.
3. Disposisi, pembagian tugas dan tupoksi para pelaksana atau aparat sudah sesuai dengan keterampilan dan keinginan masing-masing aparat, namun program yang dijalankan tidak semuanya terlaksana, Kemudian pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) penggunaan Dana Desa dari pemerintah pusat ke Desa Mentulik yang tidak tepat waktu.
4. Struktur Birokrasi, seluruh aparat sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang dilaksanakan namun kurang maksimal karna faktor penghambat yang ada.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan Dana Desa yang ada di Desa Mentulik yang sudah peneliti jelaskan diatas, peneliti dapat memberikan beberapa saran alternatif sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham dengan

bagaimana kebijakan dari Dana Desa yang ada di desanya, kemudian juga masyarakat lebih paham akan program program yang akan dilaksanakan, urgensinya apa, fungsinya apa untuk masyarakat setempat, sehingga hal ini menjadikan masyarakat lebih paham dan teredukasi.

2. Melakukan pemasangan spanduk atau banner bahkan poster dalam hal pemberitahuan kepada masyarakat melalui alat bantu jika memang tidak bisa melakukan sosialisasi secara langsung.
3. Untuk pemerintahan desa harus membuat tanggal, tanggal atau jadwal-jadwal terstruktur jauh hari sebelum pelaksanaan musyawarah, agar seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti musyawarah
4. Pemerintah Pusat harus mempercepat penyerahan pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) mengenai Dana Desa kepada desa sebelum bulan-bulan di mana desa harus menyerahkan laporan perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar desa dapat merencanakan penggunaan Dana Desa dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azwar, Saifuddin. 2009. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London England.

Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: Elex Media Computendo.

Jurnal, Skripsi, dan Media Online

Abdullah, et al. Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap

Cristian, Harry, 2015, Studi Tentang Pelaksanaan Rrencana Kerja Pembangunan Desa (Rkpdes) Tahun 2013 di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, Jurnal Fisip, Universitas Mulwarman.

Halim, Abdul, 2017, Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) dalam bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanahh Meah

Kabupaten Indragiri Hilir, Ju

Ikhwan, Saepul. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Provinsi Tangerang Tahun 2009-2011." Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif

pada Pemerintah

Desa Pagedangan, Kecar

Hidayatullah Jakarta,

Indah Dwi Q, "Menakar Peluang dan Tantangan Terhadap Implementasi

Undang- Undang Nomor 6 T

Jurnal.kemendagri.go.id. Implementasi Affirmasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa

Jurnal.stie-aas.ac.id. Perencanaan Dana

Desa untuk Pengembangan Desa Wisata |

Fatmasari. Openjournal.unpam.ac.id. Dana

Desa Terhadap Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat
Desa

Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2012.

Perencanaan pembangunan desa menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa dalam

prespektif fikih siyasah: studi kasus di Desa Sumb